

PERUBAHAN RENJA AKHIR

2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja dapat dilakukan perubahan. Sebagaimana tertulis pada Pasal 343 ayat (1) bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan yang meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Selanjutnya pada Pasal 360 ayat (2) disebutkan Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan pada ayat (3) disebutkan Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Nomor 050/385/VI/P2EPD/Bappeda-2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023, melakukan penyusunan Rancangan Perubahan Renja Tahun 2023 yang pada akhirnya nanti digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
- 14) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);

- 15) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- 16) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
- 17) Keputusan Gubernur Sumatera Nomor 489-24-2023 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
- 18) Surat Edaran Gubernur Nomor: 050/385/V/P2EPD/Bappeda-2023 tentang Penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud Rancangan Akhir Perubahan Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah memberikan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan triwulan berikutnya berdasarkan hasil evaluasi kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2023 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebagai berikut:

- 1) Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- 2) Menyediakan acuan bagi Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2023 secara terpadu, terarah dan terukur;

- 3) Memudahkan seluruh jajaran aparatur Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Sumatera Barat untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Perubahan Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan perubahan Renja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II

Memuat penjelasan tentang pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2023;

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang mengalami perubahan berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023;

BAB IV Penutup

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Renja dan rencana tindak lanjutnya.

B A B II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2023 sebagaimana dimaksud selain untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program, implikasi yang timbul serta tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil, hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2023 dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Hasil evaluasi Renja Akhir Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, adalah sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA
PENCAPAIAN RENCANA STRATEGIS SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Nama OPD : BIRO ORGANISASI

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN					INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALANAN (TAHUN 2023) YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	% CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN ANGGARAN
1	2					3	5	6	7	8	9	10
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	1.347.881.904	50%	660.224.080	50,00	48,98
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	9.671.500	50%	6.929.600	50,00	71,65
4 01 01 1 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	1.533.000	1 Dokumen	1.517.500	100,00	98,99			
4 01 01 1 04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	1 Dokumen	1.669.600	1 Dokumen	1.666.000	100,00	99,78			
4 01 01 1 06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	4.503.500	1 Dokumen	2.749.700	100,00	61,06			
4 01 01 1 07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Daerah yang disusun	1 Dokumen	1.965.400	1 Dokumen	996.400	100,00	50,70			
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	68.635.000	50%	26.308.000	50,00	38,33
4 01 01 1.02 02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Honor	7 Orang	68.100.000	6 Orang	25.935.000	85,71	38,08			
4 01 01 1.02 04		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan /triwulanan/semesteran yang disiapkan	1 Laporan	535.000	2 Laporan	373.000	200,00	38,08			
4 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.806.500	50%	1.806.500	50,00	100,00
4 01 01 1.03 04		Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen hasil pemantauan dan penertiban	1 Dokumen	1.148.600	1 Dokumen	1.148.600	100,00	100,00			
			Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorinya	1 Orang		1 Orang		100,00	100,00			
4 01 01 1.03 06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	657.900	1 Dokumen	657.900	100,00	100,00			
4 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	10.000.000	0%	0	0,00	0,00
4 01 01 1.05 11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek yang diikuti	1 Bimtek	10.000.000	Bimtek	0	0,00	0,00			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALANAN (TAHUN 2023) YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	% CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN ANGGARAN
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	721.680.280	50%	356.889.300	50,00	49,45
4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	31 Bahan	31.675.000	8 Bahan	16.635.100	25,81	52,52
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Barang	35.024.700	6 Barang	15.512.200	50,00	44,29
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan Konsultasi	100 Laporan	654.980.580	68 Laporan	324.742.000	68,00	49,58
4 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	362.918.580	0	202.350.000	0,00	55,76
4 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel baru yang disediakan	31 Unit set	151.313.300	Unit set		0,00	0,00
4 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Baru	17 Unit	211.605.280	14 Unit	202.350.000	82,35	95,63
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	85.140.044	50%	37.140.680	50,00	43,62
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	500 Surat	8.187.500	518 Surat	6.184.250	103,60	75,53
4 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	12 Bulan	3.000.000	Bulan	0	0,00	0,00
4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum kantor yang tersedia	2 Orang	73.952.544	2 Orang	30.956.430	100,00	41,86
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	88.030.000	50%	28.800.000	50,00	32,72
4 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 Unit	39.190.000	Unit	12.185.000	0,00	31,09
4 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara	1 Unit	34.100.000	Unit	11.845.000	0,00	34,74

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALANAN (TAHUN 2023) YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023		
			TARGET CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	% CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN ANGGARAN	
4 01 01 1.09 06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21 Unit	14.740.000	9 Unit	4.770.000	42,86	32,36
4 01 02		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase pembentukan perangkat daerah sesuai urusan	100%	1.786.637.450	50%	626.883.854	50,00	35,09
4 01 02 1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase pembentukan perangkat daerah sesuai urusan	100%	573.188.150	50%	148.832.998	50,00	25,97
4 01 02 1.01 01		Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah produk hukum daerah terkait kelembagaan perangkat daerah yang disusun	1 Ranperda/ra npergub	145.784.750	4 Ranperda/r anpergub	55.860.853	400,00	38,32
4 01 02 1.01 02		Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah rekomendasi penataan kelembagaan yang dikeluarkan	80 %	245.225.200	75 %	53.004.095	93,75	21,61
4 01 02 1.01 03		Penataan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang telah dibina penataan jabatan	80 %	182.178.200	75 %	39.968.050	93,75	21,94
			persentase perangkat daerah yang telah dilakukan penataan jabatan	80 %		100 %		125,00	
4 01 02 1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase pembentukan perangkat daerah sesuai urusan	100%	1.213.449.300	50%	478.050.856	50,00	39,40
4 01 02 1.02 01		Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Kab/Kota yang dibina/asistensi	18 Kab/Kota	227.462.200	10 Kab/Kota	141.886.400	55,56	62,38
			Jumlah peserta bimtek RB Kabupaten/Kota	84 Orang		84 Orang		100,00	
			Jumlah Peserta Sosialisasi RB	102 Orang		102 Orang		100,00	
			Rancangan Pergub Road Map RB Tematik	1 Dokumen		1 Dokumen		100,00	
4 01 02 1.02 02		Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Analisa Akuntabilitas Kinerja yang disusun	1 Dokumen	207.505.000	1 Dokumen	76.537.300	100,00	36,88
			Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen		100,00	
			Jumlah Kab/Kota yang di coaching/asistensi Dokumen SAKIPNYA	2 Kab/Kota		1 Kab/Kota		50,00	
			Jumlah Money Pencapaian Target Perjanjian Kinerja OPD yang dilaksanakan	2 Kali		Kali		0,00	

Berdasarkan tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 diatas, secara umum realisasi serapan anggaran baru mencapai 41,06% dan realisasi kinerja 50,85. Hal ini disebabkan antara lain karena:

1. Ketidakkonsistenan terhadap perencanaan kas yang sudah disusun.
2. Adanya perubahan jadwal kegiatan-kegiatan yang ada pada Biro Organisasi sehingga tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan

Berdasarkan kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2023 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2023 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada mekanisme Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil terhadap hal tersebut di atas adalah:

1. Optimalisasi menjaga konsistensi target-target kinerja perencanaan dan penganggaran.
2. Melakukan penyesuaian/perubahan terhadap indikator dan target kinerja serta kerangka pendanaan Renja terutama terhadap target kinerja sub kegiatan yang belum terpenuhi namun alokasi anggarannya masih tersedia maupun penambahan alokasi anggaran pada target kinerja yang belum terlampaui melalui mekanisme pergeseran antar program/kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B A B III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana kerja Akhir Biro Organisasi Tahun 2023 disusun dalam rangka pencapaian target indikator kinerja dan sasaran strategis tahun 2023. Penyusunan perubahan rencana kerja ini dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran serta hal-hal dari berbagai faktor yang akan dapat mempengaruhi tujuan dan sasaran strategis tersebut. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam merumuskan atau merencanakan program dan kegiatan tahun 2023 disesuaikan/diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi. Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kelancaran administrasi perkantoran dilingkungan Biro. Untuk kelancaran proses administrasi perkantoran diperlukan adanya program dan kegiatan yang menunjang terlaksananya kegiatan-kegiatan pelayanan yang menjadi tanggung jawab Biro.
2. Pencapaian misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu khusus kepada misi 7 dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yaitu mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, Akuntabel serta berkualitas dengan Program dan kegiatan yang dirumuskan untuk menunjang pencapaian misi tersebut dari aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan akuntabilitas serta pelayanan publik.

3.1 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi dan merealisasikan misi yang telah dirumuskan, perlu ditetapkan tujuan untuk suatu periode sebagai suatu ukuran keadaan yang ingin diwujudkan dalam skala periode terbatas (sampai dengan lima tahun). Tujuan akan menentukan bagian- bagian tujuan yang lebih pendek atau sasaran yang akan diwujudkan sebagai indikator dapat tidaknya suatu tujuan terwujud. Tujuan

merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi.

**Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Perubahan Renja Biro Organisasi
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun -
				2022
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan	Meningkatnya Kelembagaan yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100
			Persentase Kab/Kota yang OPDnya tepat Fungsi dan tepat ukuran	100
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A	10
		Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	12,7
3.	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pelaksanaan Area Manajemen Perubahan	Hasil Penilaian Mandiri Area Manajemen Perubahan	1,85
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik yang berkualitas	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik lolos saringan Kompetisi secara nasional	9
		Penataan Ketatalaksanaan yang efektif	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan penguatan ketatalaksanaan	16
5	Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi	A (81)

		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi	86 (Baik)
--	--	---	---	-----------

3.2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023

Kerangka kerja dan pendanaan pada Rancangan Akhir Perubahan Renja Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan kerangka kerja Pembangunan Daerah (RKPD-P) Tahun 2023 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat daerah maupun menunjang terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah.

Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2023 yang terdapat pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023 tercantum sebagaimana pada tabel berikut:

TABEL 3.1
REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD BIRO ORGANISASI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023
PROVINSI SUMATERA BARAT

NAMA OPD : BIRO ORGANISASI

No.	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	1.370.006.748	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	1.370.006.748	
4.01.01.1.01	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi	Persentase Terlaksananya Penyusunan Laporan	100%	9.671.500	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi	Persentase Terlaksananya Penyusunan Laporan	100%	9.671.500	
4.01.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen	1.533.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen	1.533.000
4.01.01.1.01.04			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	1 Dokumen	1.669.600		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	1 Dokumen	1.669.600
4.01.01.1.01.06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	4.503.500		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	4.503.500
4.01.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	1 Dokumen	1.965.400		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	1 Dokumen	1.965.400
4.01.01.1.02	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	71.395.000	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	71.395.000	
4.01.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honorarium	7 Orang	70.860.000		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honorarium	7 Orang	70.860.000
4.01.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran/SKPD	Jumlah Laporan keuangan/Bulanan/triwulanan yang disiapkan	1 Laporan	535.000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran/SKPD	Jumlah Laporan keuangan/Bulanan/triwulanan yang disiapkan	1 Laporan	535.000
4.01.01.1.03	3 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang ditertibkan	100%	1.806.500	3 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang ditertibkan	100%	1.806.500	
4.01.01.1.03.04			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Dokumen hasil pemantauan dan penerbitan	1 Dokumen	1.148.600		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Dokumen hasil pemantauan dan penerbitan	1 Dokumen	1.148.600
4.01.01.1.03.06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pengelolaan BMD SKPD yang dibayarkan honornya	1 Orang			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pengelolaan BMD SKPD yang dibayarkan honornya	1 Dokumen	
4.01.01.1.03.06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1 Dokumen	657.900		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1 Dokumen	657.900
4.01.01.1.05	4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%	6.265.000	4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%	6.265.000	
4.01.01.1.05.11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimtek yang diikuti	1 Bimtek	6.265.000		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimtek yang diikuti	1 Bimtek	6.265.000
4.01.01.1.06	5 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terpenuhinya kebutuhan ATK, dan Kebutuhan makan minum rapat serta perjalanan dinas	12 Bulan	756.571.780	5 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terpenuhinya kebutuhan ATK, dan Kebutuhan makan minum rapat serta perjalanan dinas	12 Bulan	756.571.780	
4.01.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2 Paket	29.300.000		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2 Paket	29.300.000
4.01.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	31 Bahan	31.675.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	31 Bahan	31.675.000
4.01.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Barang	25.616.200		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Barang	25.616.200

No.	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN (Rp.)		
4.01.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan konsultasi	100 Laporan	669.980.580			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan konsultasi	100 Laporan	669.980.580
4.01.01.1.07	6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	100%	353.675.712	6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	100%	353.675.712
4.01.01.1.07.05			Pengadaan Mebel	Jumlah mebel baru yang disediakan	31 Unit, Set	149.229.012			Pengadaan Mebel	Jumlah mebel baru yang disediakan	31 Unit, Set	149.229.012
4.01.01.1.07.06			Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru	17 Unit	204.446.700			Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru	17 Unit	204.446.700
4.01.01.1.08	7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	82.591.256	7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	82.591.256
4.01.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat surat keluar dalam 1 tahun	500 Surat	8.187.500			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat surat keluar dalam 1 tahun	500 Surat	8.187.500
4.01.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	12 Bulan	0			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	12 Bulan	0
4.01.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	2 Orang	74.403.756			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	2 Orang	74.403.756
4.01.01.1.09	8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tertibkan	100%	88.030.000	8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	88.030.000
4.01.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	1 Unit	39.190.000			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	1 Unit	39.190.000
4.01.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	1 Unit	34.100.000			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	1 Unit	34.100.000
4.01.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21 Unit	14.740.000			Pemeliharaan Peralatan dan Meisn Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21 Unit	14.740.000
II	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			Persentase Kab/Kota yang memiliki kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi dan tepat ukuran	100%	1.751.901.450	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			Persentase Kab/Kota yang memiliki kelembagaan Perangkat Daerah tepat fungsi dan tepat ukuran	100%	2.042.005.950
				Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%					Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%	
				Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%					Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%	
4.01.02.1.01	9		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase meningkatnya penataan kelembagaan dan jabatan perangkat daerah yng tepat fungsi dan tepat ukur	100%	573.188.150	9		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase meningkatnya penataan kelembagaan dan jabatan perangkat daerah yng tepat fungsi dan tepat ukur	100%	627.403.400
				Persentase OPD yang pembentukannya sesuai perundang-undangan kelembagaan	90%					Persentase OPD yang pembentukannya sesuai perundang-undangan kelembagaan	90%	
4.01.02.1.01.01			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah produk hukum daerah terkait kelembagaan perangkat daerah yang disusun	1 Ranperda/Ranpergub	145.784.750			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah produk hukum daerah terkait kelembagaan perangkat daerah yang disusun	1 Ranperda/Ranpergub	200.000.000
4.01.02.1.01.02			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah rekomendasi penataan kelembagaan yang dikeluarkan	80%	245.225.200			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah rekomendasi penataan kelembagaan yang dikeluarkan	80%	245.225.200
4.01.02.1.01.03			Penataan Analisis Jabatan	Persentase perangkat daerah yang telah dibina penataan jabatan	80%	182.178.200			Penataan Analisis Jabatan	Persentase perangkat daerah yang telah dibina penataan jabatan	80%	182.178.200
				Persentase perangkat daerah yang telah dilakukan penataan jabatan	80%				Penataan Analisis Jabatan	Persentase perangkat daerah yang telah dilakukan penataan jabatan	80%	0

No.	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN (Rp.)
4.01.02.1.02	10	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Komponen pemenuhan untuk 4 Area Perubahan Reformasi Birokrasi (Area Manajemen Perubahan, Penguatan Akuntabilitas, Penataan Tatalaksana, Pelayanan Publik)	5 Skor	1.178.713.300	10	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Komponen pemenuhan untuk 4 Area Perubahan Reformasi Birokrasi (Area Manajemen Perubahan, Penguatan Akuntabilitas, Penataan Tatalaksana, Pelayanan Publik)	5 Skor	1.414.602.550
4.01.02.1.02.01		Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Kab/Kota yang dibina/Asistensi	18 Kab/Kota	227.426.200		Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Kab/Kota yang dibina/Asistensi	18 Kab/Kota	227.426.200
			Jumlah Peserta Bimtek RB Kab/Kota	84 Orang				Jumlah Peserta Bimtek RB Kab/Kota	84 Orang	
			Jumlah Peserta Sosialisasi Reformasi Birokrasi	102 Orang				Jumlah Peserta Sosialisasi Reformasi Birokrasi	102 Orang	
4.01.02.1.02.02		Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Analisa Akuntabilitas Kinerja yang disusun	1 Dokumen	207.505.000		Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Analisa Akuntabilitas Kinerja yang disusun	1 Dokumen	346.875.000
			Jumlah dokumen perjanjian kinerja pemerintah yang disusun	1 Dokumen				Jumlah dokumen perjanjian kinerja pemerintah yang disusun	1 Dokumen	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang dicoaching/asistensi Dokumen SAKIPNYA	2 Kab/Kota				Jumlah Kabupaten/Kota yang dicoaching/asistensi Dokumen SAKIPNYA	2 Kab/Kota	
			Jumlah Monev Pencapaian Target Perjanjian Kinerja OPD yang dilaksanakan	2 Kali				Jumlah Monev Pencapaian Target Perjanjian Kinerja OPD yang dilaksanakan	2 Kali	
			Jumlah perangkat daerah yang dibina dalam implementasi SAKIP	51 OPD				Jumlah perangkat daerah yang dibina dalam implementasi SAKIP	51 OPD	
			Jumlah peserta percepatan implementasi SAKIP Prov. SUMBAR	110 Orang				Jumlah peserta percepatan implementasi SAKIP Prov. SUMBAR	110 Orang	
4.01.02.1.02.03		Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Internalisasi ASN berakhlak ASN pemerintah Prov. SUMBAR	142 Peserta	103.480.750		Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Internalisasi ASN berakhlak ASN pemerintah Prov. SUMBAR	152 Peserta	200.000.000
4.01.02.1.02.04		Pengelolaan Tatalaksana Pemeintahan	Jumlah perangkat daerah yang dibina dalam penyusunan Probis	8 Perangkat Daerah	195.994.950		Pengelolaan Tatalaksana Pemeintahan	Jumlah perangkat daerah yang dibina dalam penyusunan Probis	8 Perangkat Daerah	195.994.950
			Jumlah perangkat daerah yang dibina dalam penyusunan SOP	8 Perangkat Daerah				Jumlah perangkat daerah yang dibina dalam penyusunan SOP	8 Perangkat Daerah	0
			Jumlah terlaksananya pembinaan SOP dan Probis Kab/Kota	7 Perangkat Daerah				Jumlah terlaksananya pembinaan SOP dan Probis Kab/Kota	7 Perangkat Daerah	0
			Peserta rapat koordinasi Kab/Kota	112 Orang				Peserta rapat koordinasi Kab/Kota	112 Orang	0
4.01.02.1.02.05		Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Peserta digitalisasi pelayanan publik	150 Orang	444.306.400		Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Peserta digitalisasi pelayanan publik	-	444.306.400
			Jumlah UKPP Provinsi yang dibina Standar Sarana dan Prasarana	70 UKPP				Jumlah UKPP Provinsi yang dibina Standar Sarana dan Prasarana	70 UKPP	
			Jumlah UKPP yang menerapkan SIPP	30 UKPP				Jumlah UKPP yang menerapkan SIPP	30 UKPP	
			Jumlah UKPP yang menerapkan Standar Pelayanan	30 UKPP				Jumlah UKPP yang menerapkan Standar Pelayanan	30 UKPP	
			Jumlah UKPP yang mengikuti Kompetisi	30 UKPP				Jumlah UKPP yang mengikuti Kompetisi	30 UKPP	

3.3 Kerangka Kerja dan Pendanaan pada Rancangan Akhir Perubahan Renja Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2023 serta berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan sampai dengan kondisi Triwulan II Tahun 2023, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun tabel perbandingan sebagaimana diilustrasikan pada tabel berikut:

TABEL 3.3
RUMUSAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BIRO ORGANISASI PROVINSI SUMATERA BARAT
BERDASARKAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN				INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN		INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SETELAH		PAGU ANGGARAN AWAL (Rp.)	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)	Ket		
					INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET INDIKATOR						
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10		
	URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH								3.134.519.354	3.121.908.198	-12.611.156			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	1.347.881.904	1.370.006.748	22.124.844		
4	01	01	1	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Persentase terlaksananya penyusunan laporan	100%	9.671.500	9.671.500	0		
4	01	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen	1.533.000	1.533.000	0	Pagu Biro Organisasi tidak ada pengurangan dan penambahan
4	01	01	1	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	1 Dokumen	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	1 Dokumen	1.669.600	1.669.600	0	
4	01	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	4.503.500	4.503.500	0	
4	01	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	1 Dokumen	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	1 Dokumen	1.965.400	1.965.400	0	
4	01	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Persentase terlaksananya Pelayanan Administasi Keuangan	100%	68.635.000	71.395.000	2.760.000	Biro Umum salah saat melakukan penginputan sehingga anggaran biro organisasi masuk kedalam anggaran biro umum sebesar 12.611.156. di Tahapan KUA-PPAS Pagu Biro Organisasi telah kembali disesuaikan dengan pagu murni 2023.
4	01	01	1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honorarium	7 Orang	Jumlah ASN yang mendapatkan honorarium	7 Orang	68.100.000	70.860.000	2.760.000	
4	01	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan /Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulan /semesteran yang disiapkan	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulan /semesteran yang disiapkan	1 Laporan	535.000	535.000	0	
4	01	01	1	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Persentase Barang Milik Daerah yang ditertibkan	100%	1.806.500	1.806.500	0	
4	01	01	1	03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Dokumen hasil pemantauan dan penerbitan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen hasil pemantauan dan penerbitan	1 Dokumen	1.148.600	1.148.600	0	
							Jumlah pengelolaan BMD SKPD yang dibayarkan honornya	1 Orang	Jumlah pengelolaan BMD SKPD yang dibayarkan honornya	1 Orang			0	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN					INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN		INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SETELAH		PAGU ANGGARAN AWAL (Rp.)	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)	Ket
						INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET INDIKATOR				
4	01	01	1	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	657.900	657.900	0
4	01	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	10.000.000	6.265.000	-3.735.000
4	01	01	1	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek yang diikuti	1 Bimtek	Jumlah Bimtek yang diikuti	1 Bimtek	10.000.000	6.265.000	-3.735.000
4	01	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Terpenuhinya kebutuhan ATK, dan Kebutuhan Makan Minum Rapat serta Perjalanan Dinas	100%	721.680.280	756.571.780	34.891.500
4	01	01	1	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2 Paket	0	29.300.000	29.300.000
4	01	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	31 Bahan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	31 Bahan	31.675.000	31.675.000	0
4	01	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Barang	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Barang	35.024.700	25.616.200	-9.408.500
4	01	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan konsultasi	100 Laporan	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan konsultasi	100 Laporan	654.980.580	669.980.580	15.000.000
4	01	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	100%	362.918.580	353.675.712	-9.242.868
4	01	01	1	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel baru yang disediakan	31 Unit, Set	Jumlah mebel baru yang disediakan	31 Unit, Set	151.313.300	149.229.012	-2.084.288
4	01	01	1	07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru	17 Unit	Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru	17 Unit	211.605.280	204.446.700	-7.158.580
4	01	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	85.140.044	82.591.256	-2.548.788
4	01	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat surat keluar dalam 1 tahun	500 Surat	Jumlah Surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	500 Surat	8.187.500	8.187.500	0

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN						INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN		INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SETELAH		PAGU ANGGARAN AWAL (Rp.)	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)	Ket
							INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET INDIKATOR				
4	01	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	12 Bulan	Jumlah Kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	12 Bulan	3.000.000	0	-3.000.000	
4	01	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	2 Orang	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	2 Orang	73.952.544	74.403.756	451.212	
4	01	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100%	88.030.000	88.030.000	0	
4	01	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	1 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	1 Unit	39.190.000	39.190.000	0	
4	01	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara	1 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara	1 Unit	34.100.000	34.100.000	0	
4	01	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21 Unit	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21 Unit	14.740.000	14.740.000	0	
4	01	02				PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Pembentukan Perangkat Daerah sesuai urusan	100%	Persentase Kab/Kota yang memiliki kelembagaan Perangkat Daerah tepat	100%	1.786.637.450	1.751.901.450	-34.736.000	
									Persentase Penataan Jabatan Perangkat Daerah	100%				
									Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100%				
4	01	02	1	01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Pembentukan Perangkat Daerah sesuai urusan	100%	Persentase Meningkatnya penataan kelembagaan dan jabatan perangkat daerah yang tepat	100%	573.188.150	573.188.150	0	
									Persentase OPD yang pembentukan sesuai perundang-undangan kelembagaan	100%				
4	01	02	1	01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah produk hukum daerah terkait kelembagaan perangkat daerah yang disusun	1 Ranperda/Ranpergub	Jumlah produk hukum daerah terkait kelembagaan perangkat daerah yang disusun	1 Ranperda/Ranpergub	145.784.750	145.784.750	0	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN						INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN		INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SETELAH		PAGU ANGGARAN AWAL (Rp.)	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)	Ket
							INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET INDIKATOR				
4	01	02	1	01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah rekomendasi penataan kelembagaan yang dikeluarkan	80%	Persentase Jumlah rekomendasi penataan kelembagaan yang dikeluarkan	80%	245.225.200	245.225.200	0	
4	01	02	1	01	03	Penataan Analisis Jabatan	Persentase perangkat daerah yang telah dilakukan penataan jabatan	80%	Persentase perangkat daerah yang telah dilakukan penataan jabatan	80%	182.178.200	182.178.200	0	
							Persentase perangkat daerah yang telah dilakukan penataan jabatan	1 Laporan	Persentase perangkat daerah yang telah dilakukan penataan jabatan	1 Laporan			0	
4	01	02	1	02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Pembentukan Perangkat Daerah sesuai urusan	100%	Nilai komponen Pemenuhan untuk 4 Area Perubahan Reformasi Birokrasi (Area Manajemen Perubahan, Penguatan Akuntabilitas, Penataan Tataaksana, Pelayanan Publik)	5 skor	1.213.449.300	1.178.713.300	-34.736.000	
4	01	02	1	02	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Kab/Kota yang dibina/Asistensi	18 Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dibina/Asistensi	18 Kab/Kota	227.462.200	227.426.200	-36.000	
							Jumlah Peserta Bimtek RB Kab/Kota	84 Orang	Jumlah Peserta Bimtek RB Kab/Kota	84 Orang				
							Jumlah Peserta Sosialisasi Reformasi Birokrasi	102 Orang	Jumlah Peserta Sosialisasi Reformasi Birokrasi	102 Orang				
4	01	02	1	02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Analisa Akuntabilitas Kinerja yang disusun	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Analisa Akuntabilitas Kinerja yang disusun	1 Dokumen	207.505.000	207.505.000	0	
							Jumlah dokumen perjanjian kinerja pemerintah yang disusun	1 Dokumen	Jumlah dokumen perjanjian kinerja pemerintah yang disusun	1 Dokumen				
							Jumlah Kabupaten/Kota yang dicoaching/asistensi Dokumen SAKIPNYA	2 Kab/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang dicoaching/asistensi Dokumen SAKIPNYA	2 Kab/Kota				
							Jumlah Monev Pencapaian Target Perjanjian Kinerja OPD yang dilaksanakan	2 Kali	Jumlah Monev Pencapaian Target Perjanjian Kinerja OPD yang dilaksanakan	2 Kali				

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN		INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SETELAH		PAGU ANGGARAN AWAL (Rp.)	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp.)	Ket
		INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET INDIKATOR				
		Jumlah perangkat daerah yang dibina dalam implementasi SAKIP	51 OPD	Jumlah perangkat daerah yang dibina dalam implementasi SAKIP	51 OPD				
		Julah peserta percepatan implementasi SAKIP Prov.SUMBAR	110 Orang	Julah peserta percepatan implementasi SAKIP Prov.SUMBAR	110 Orang				
4	01 02 1 02 03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Internalisasi ASN berakhlak ASN pemerintah Prov.SUMBAR	142 Peserta	Internalisasi ASN berakhlak ASN pemerintah Prov.SUMBAR	142 Peserta	103.480.750	103.480.750	0
4	01 02 1 02 04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang dibina dalam penyusunan Probis	8 Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dibina dalam penyusunan Probis	8 Perangkat Daerah	195.994.950	195.994.950	0
	Jumlah perangkat daerah yang dibina dalam penyusunanSOP		8 Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dibina dalam penyusunanSOP	8 Perangkat Daerah				
	Jumlah terlaksananya pembinaan SOP dan Probis Kab/Kota		7 Perangkat Daerah	Jumlah terlaksananya pembinaan SOP dan Probis Kab/Kota	7 Perangkat Daerah				
	Peserta rapat koordinasi Kab/Kota		112 Orang	Peserta rapat koordinasi Kab/Kota	112 Orang				
4	01 02 1 02 05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Peserta digitalisasi pelayanan publik	150 Orang	Jumlah Peserta digitalisasi pelayanan publik	150 Orang	479.006.400	444.306.400	-34.700.000
	Jumlah UKPP Provinsi yang dibina Standar Sarana dan Prasarana Pelayanan		70 UKPP	Jumlah UKPP Provinsi yang dibina Standar Sarana dan Prasarana Pelayanan	70 UKPP				
	Jumlah UKPP yang menerapkan SIPP		30 UKPP	Jumlah UKPP yang menerapkan SIPP	30 UKPP				
	Jumlah UKPP yang menerapkan Standar Pelayanan		30 UKPP	Jumlah UKPP yang menerapkan Standar Pelayanan	30 UKPP				
	Jumlah UKPP yang mengikuti Kompetisi		30 UKPP	Jumlah UKPP yang mengikuti Kompetisi	30 UKPP				

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat ada perubahan indikator-indikator kinerja dan jumlah alokasi anggaran masing-masing sub kegiatan antara kondisi awal RKPD dan rencana pada perubahan Akhir RKPD. secara umum tidak terjadi penambahan pagu pada perubahan anggaran, dikarenakan kesalahan penginputan dari Biro Umum sehingga Biro Organisasi mengalami pengurangan anggaran sebesar **Rp. 12,611,156,-** namun di Tahapan KUA-PPAS Pagu Biro Organisasi telah kembali disesuaikan dengan pagu murni 2023. Sebesar **Rp. 3,134,519,354,-**.

B A B IV P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Akhir Biro Organisasi Tahun 2023 disusun dalam rangka pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Tahun 2023. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan kemampuan sumber daya yang tersedia beserta berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Akhir Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 ini diajukan untuk dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023.

Padang, 2023

KEPALA BIRO ORGANISASI



FITRIATI.M,S.Si,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19730513 199703 2 005